

SERI

MEMORIA PASSIONIS

LAPORAN SITUASIONAL NABIRE

KABUPATEN NABIRE

“PERISTIWA 28 FEBRUARI 2000”

SERTA

SEBELUM dan SESUDAHNYA

OLEH

SEKRETARIAT KEADILAN & PERDAMAIAN
KEUSKUPAN JAYAPURA
PAPUA, INDONESIA

JAYAPURA
JUNI 2000



KEUSKUPAN JAYAPURA

SEKRETARIAT Keadilan dan Perdamaian
KOTAK POS 1379
JAYAPURA 99013
PAPUA—INDONESIA

Kepada Yang Terhormat.

Gubernur Papua (Caretaker): Bpk. Marsk. I (Purn) Musiran Darmosuwito

Ketua DPRD I Papua: Bpk. T.N. Kaiway

Kapolda Irija : Brigjend. Pol. Drs. S.Y. Wenas

Pangdam XVII/ Trikora: Mayjend. TNI. Albert Inkiriwang

Di

JAYAPURA

Dengan hormat,

Bersama dengan ini kami sampaikan satu berkas laporan : **LAPORAN SITUASIONAL NABIRE, KABUPATEN NABIRE: PERISTIWA 28 FEBRUARI 2000 serta SEBELUM DAN SESUDAHNYA.** Mohon Bapak-bapak berkenan menerimanya.

Insiden berdarah di Nabire yang terjadi tanggal 28 dan 29 Februari 2000 yang lalu telah mengguncangkan kehidupan masyarakat baik yang tinggal di Nabire sendiri maupun di wilayah pedalaman Paniai yang menjadikan Nabire sebagai pintu masuknya. Peristiwa tersebut juga mengejutkan kami selaku pemimpin Gereja-gereja yang mencakup wilayah tersebut. Keterkejutan kami terutama disebabkan oleh terulangnya peristiwa jatuhnya korban sebagai akibat sikap dan tindakan aparat keamanan yang kurang profesional. Hal sedemikian itu sungguh memprihatinkan kami.

Untuk mengetahui secara lebih jelas dan teliti situasi Nabire, maka kami mengadakan penelitian dan pendataan lapangan yang hasilnya tertuang dalam laporan ini. Menjadi jelas bagi kami, para pemimpin Gereja, bahwa peristiwa Nabire adalah buah dari perkembangan situasi kemasyarakatan yang kompleks dan melibatkan berbagai instansi baik dalam pemerintahan, militer, maupun dalam masyarakat sendiri.

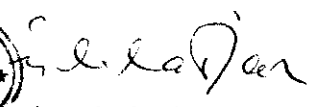
Berdasarkan hasil pendataan di lapangan dan dilandasi oleh misi kami selaku Gereja, kami terdorong untuk membagikan pemahaman situasi Nabire yang kompleks itu kepada para pejabat yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan Nabire

secara menyeluruh. Segi-segi yang lebih konkret dalam upaya penyelesaian itu kami gariskan dalam bagian rekomendasi/ saran dalam laporan ini. Sengaja kami menggarisbawahi segi penyelesaian menyeluruh mengingat tindakan membiarkan peristiwa Nabire akan memendam luka traumatik di hati masyarakat dan tidak akan pernah menyelesaikan konflik.

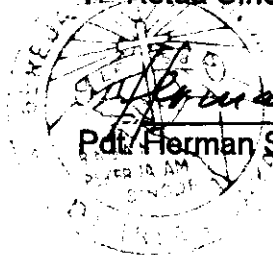
Demikianlah pernyataan kami dan atas perhatian serta kesediaan Bapak-bapak, kami ucapkan terimakasih sebesar-besarnya. Teriring salam hormat dan doa kami.

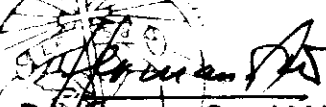
Jayapura, Juni 2000

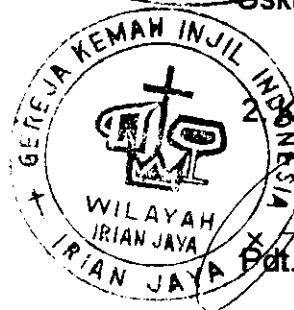



Mgr. Dr. Leo Laba Ladjar OFM
Uskup Jayapura

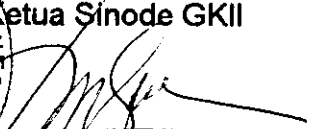
Mengetahui,
1. Ketua Sinode GKI




Pdt. Herman Saud M.Th



2. Ketua Sinode GKII


Pdt. John Gobay

Tembusan:

1. Vikep Wilayah Barat Keuskupan Jayapura di Enarotali
2. Pastor Paroki Kristus Sahabat Kita di Nabire
3. Presidium Dewan Papua di Jayapura
4. Ketua Konferensi Waligereja Indonesia di Jakarta
5. Ketua Komisi Hak Azasi Manusia Nasional di Jakarta
6. Ketua Komisi Ombudsman Nasional di Jakarta
7. Jaringan Kerja SKP Keuskupan Jayapura



**KEUSKUPAN JAYAPURA
KOTAK POS 1379
JAYAPURA 99013
PAPUA—INDONESIA**

**SEKRETARIAT Keadilan & Perdamaian
TEL: +62-967-534993
FAX: +62-967-536427
E-Mail: sekkp@jayapura.wasantara.net.id**

OFFICE FOR JUSTICE AND PEACE-DIOCESE OF JAYAPURA

LAPORAN SITUASIONAL NABIRE

Laporan berikut ini merupakan laporan awal¹ mengenai situasi kota Nabire dalam kaitan dengan insiden Nabire berdarah tgl. 28 Februari 2000 hingga 4 Maret 2000. Sifat laporan ini bukanlah laporan kasus melainkan lebih laporan situasional dengan maksud mendudukkan insiden Nabire berdarah itu dalam konteks perkembangan sosio-politis yang terjadi di Papua pada umumnya dan Nabire khususnya.

Secara sistematis, laporan ini terdiri dari tiga bagian besar yang tidak seimbang mengingat perbedaan tingkat kepentingan masalah dan ketersediaan data. Tiga bagian itu adalah sbb.

- A. Situasi kota Nabire sekitar pengibaran bendera Papua. Bagian ini akan menguraikan secara singkat unsur-unsur yang berpengaruh dalam membentuk dinamika sosial politik di Nabire dan sekitarnya.
- B. Insiden Nabire berdarah. Bagian ini akan menguraikan secara khusus peristiwa bentrokan antara massa Papua dengan aparat keamanan secara kronologis.
- C. Pasca insiden. Bagian ini akan menguraikan secara singkat prospek perkembangan situasi Nabire pasca insiden.

¹ Dengan menyebut 'laporan awal', kami memaksudkan supaya laporan ini ditindaklanjuti dengan investigasi oleh instansi resmi yang memiliki kewenangan hukum (*pro iustitia*) dalam sistem peradilan HAM.

A. Situasi Nabire Sekitar Pengibaran Bendera Papua

A.1.

Situasi Nabire berkembang secara cukup cepat setelah pengumuman dari Theys Eluay tgl. 12 November 1999 di Sentani kepada seluruh masyarakat Papua untuk mengibarkan bendera Papua sejak tgl. 1 Desember 1999². Masyarakat Nabire segera bereaksi terhadap seruan itu dan merencanakan upacara pengibaran bendera Papua. Seluruh proses ini dijalankan oleh masyarakat di bawah koordinasi Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Nabire dengan ketuanya: Ohar Manase Sayori yang juga menghadiri acara syukuran Theys tersebut. Proses ini dirundingkan dengan pihak DPRD Tk. II Nabire dan mendapat persetujuan dari ketuanya: Maulid Hidayat. Sejak itu aspirasi masyarakat untuk mengibarkan bendera Papua sudah bulat.

A.2.

Berbeda dengan tempat-tempat lain di Papua, bendera Papua dikibarkan terus di Nabire sejak tanggal 1 Desember 1999 hingga hari ini. Kiranya Nabire berpegang pada rencana semula dimana masyarakat dianjurkan oleh Theys Eluay untuk mengibarkan bendera dari tanggal 1 Desember 1999 hingga tanggal 1 Mei 2000.

A.3.

Bersamaan dengan ekspresi yang makin eksplisit mengenai aspirasi kemerdekaan Papua, semakin eksplisit pula fenomena "Satgas Papua" di wilayah perkotaan Papua: Sorong, Manokwari, Biak, Jayapura, Timika, Merauke, Wamena, termasuk Nabire. Munculnya Satgas sebenarnya berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap Tim 100 sebelum dan sesudah bertemu dengan Presiden B.J. Habibie tanggal 26 Februari 1999. Kegiatan Satgas berlanjut dalam upacara pengibaran bendera tgl. 1 Desember 1999 yang lalu. Akan tetapi, karena organisasi Satgas sendiri sangat cair maka syarat keanggotaan, kedudukannya dalam perjuangan Papua, pokok tugas konkret, dan masa tugasnya pun bersifat longgar. Sifat cair inilah yang menjadikan setiap orang Papua dengan mudah mengidentifikasikan dirinya sebagai 'Satgas' untuk kepentingan apa saja. Sebaliknya, pihak luar dengan gampang membebaskan apapun tindakan masyarakat Papua ke dalam kategori 'tindakan Satgas Papua'. Pemberian cap semacam ini (stigmatisasi) dengan mudah dilakukan oleh aparat keamanan. Di Nabire, Satgas Papua a.l. mengadakan pengeledahan dan penyitaan minuman keras di pelabuhan, toko-toko,

² Kami mendasarkan pernyataan itu pada Deklarasi tokoh-tokoh Papua pada tgl. 12 November 1999 di Sentani yang dimuat dalam: *TIFA IRLAN*, no. 2495, tgl. 15-22 November 1999, hlm. 6. Dalam butir pertama dari tiga butir yang ada disebutkan " Berdasarkan deklarasi PBB tentang kemerdekaan penduduk pribumi, maka dengan ini kami menyatakan kemerdekaan bangsa Papua Barat dengan mengibarkan bendera Papua Barat di seluruh wilayah Papua Barat terhitung mulai tanggal 1 Desember 1999".

dan tempat-tempat lain.

A.4.

Di lokasi pendulangan emas rakyat di Topo, sekitar 70 km dari Nabire, kembali muncul bentrokan-bentrokan kecil antara para pendulang dengan masyarakat yang mengaku sebagai pemilik hak ulayat. Insiden terakhir yang cukup mengguncangkan kota Nabire terjadi pada pertengahan bulan Agustus 1998. Dalam perkembangannya selama kurang lebih satu tahun, situasi pendulangan emas Topo tetap diwarnai dengan bentrokan-bentrokan malah masuk unsur pemasangan palang di sejumlah tempat oleh pihak yang mengaku pemilik hak ulayat atau pihak yang mengaku sebagai Satgas Papua atau pihak yang dicap sebagai Satgas Papua oleh aparat keamanan. Kekacauan yang telah berlarut-larut dalam kegiatan pendulangan emas pada gilirannya ditindak dengan cukup tegas oleh aparat keamanan dengan 'pembersihan palang'. Tindakan ini rupanya mendatangkan aksi demo dari pihak masyarakat. Tgl. 29 November 1999, massa Satgas Papua yang dipimpin oleh Pieter Worabay (salah satu komandan Satgas Papua) mendatangi DPRD Nabire. Massa menuntut

- supaya DPRD memberikan surat keterangan yang isinya: membenarkan terjadinya pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian terhadap masyarakat pemilik hak ulayat di daerah Topo saat mengadakan 'pembersihan' palang.
- menarik Kapolres Letkol. Pol. Drs. Saprishal SH dan Kapolda yang ada.
- memberi waktu 2 jam kepada DPRD untuk membuat surat tersebut.

DPRD Nabire yang dipimpin oleh Lafandos Sihombing, Wakil Ketua II (karena Ketua DPRD Nabire sedang bepergian ke luar daerah), mengeluarkan surat keterangan yang dimaksudkan tanpa mengadakan verifikasi kejadian tersebut kepada pihak kepolisian resor Paniai.

A.5.

Pengibaran bendera, kericuhan di sekitar pendulangan emas di Topo, kehadiran Brimob, kebisuan Muspida, emosi masyarakat Papua yang meningkat—semua unsur ini akhirnya membentuk satu situasi kompleks yang mudah meledak karena jaminan kepastian hukum hampir tidak ada lagi. Berdasarkan situasi inilah Kapolres Nabire, Letkol Pol. Drs. Faisal AN mendatangkan satuan Brimob dari Jayapura ke Nabire dengan maksud melakukan tindakan hukum yang keras atau tegas untuk memelihara keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum³ di wilayahnya.

Dua peristiwa cukup penting terjadi dalam kaitan kehadiran Brimob.

1. Kamis, 10 Februari 2000, pk. 19.00,

Diadakan pertemuan di Polres Nabire. Hadir 14 orang tokoh masyarakat tetapi LMA tidak

³ Laporan Kapolres Paniai kepada Ketua DPRD Tk. II Nabire no. B/71/II/2000 tertanggal 22 Februari 2000 butir 9

hadir. Tujuan pertemuan: membahas situasi keamanan Nabire dan sekitarnya. Point-point yang diungkapkan oleh kepolisian adalah:

- Tindakan Satgas Papua dinilai oleh Kapolres sudah berlebihan dan cenderung kriminal. Tindakan itu adalah pasang palang ke lokasi pendulangan emas di Topo, tagih uang ke sopir-sopir taksi, minta uang ke toko-toko. Hal ini rupanya sudah dikeluhkan oleh para sopir dan warga masyarakat kepada Kapolres.
- Satgas Papua demo ke Mapolres dipimpin oleh Socrates Sayori dengan melibatkan ibu-ibu dan anak-anak dengan sikap melecehkan aparat keamanan a.l. dengan memamerkan pantat sambil menantang "tembak saja, tembak saja". Kapolres masih menahan anggotanya untuk tidak bertindak. Pendekatan ke masyarakat dengan kasih sayang tidak ada hasil sehingga pendekatan itu dinilai gagal.
- Nabire dianggap aman oleh Satgas karena pihak aparat dinilai lemah. Kapolres memaparkan grafik: Satgas semakin kuat tetapi aparat semakin lemah karena banyak menahan diri.
- Dari berbagai ancaman dan tindak kriminal yang muncul itu, maka akan didatangkan Satuan Brimob sebesar 100 personil dengan maksud untuk mengamankan kota dan menegakkan hukum (tidak ada kaitannya dengan penurunan Bendera Papua).

Pada akhir pertemuan disepakati: tgl. 28 Februari 2000 akan diadakan pertemuan dengan Satgas Papua di Nabire. Tidak ada reaksi menolak dari hadirin karena pertemuan lebih bersifat informatif mengenai situasi keamanan dan cara pengatasannya.

2. Selasa, 15 Februari 2000

Dua kompi Brimob masuk ke Nabire melalui kapal laut dari Jayapura dan ditempatkan di lokasi Diklat Jl. Pepera (samping rumah pribadi Bupati AP. Youw) dan sebagian di Polres. Hari berikutnya, Brimob mulai berpatroli di tempat-tempat sentral dengan membawa senapan laras panjang.

B. Insiden Nabire Berdarah

Tidak adanya jaminan kepastian hukum itu ternyata menjadi kondisi yang memadai bagi setiap tindak kekerasan entah pihak mana yang melakukannya. Konflik terbuka dan berdarah akhirnya pecah dari sebuah kejadian yang memicunya. Ada tiga hal yang diuraikan di bawah ini:

[1] kronologi insiden Nabire tgl. 28 Februari hingga 4 Maret 2000,

[2] kesaksian Yance Pekei, dan

[3] sejumlah catatan kritis mengenai peristiwa tersebut.

B.1. Kronologi Insiden

Jumat, 18 Februari 2000

Di depan Mapolres Paniai, Brimob merampas busur dan anak panah milik Eratus Kogoya dan langsung dipatahkan di depan pemiliknya⁴.

Sabtu, 19 Februari 2000

Brimob menyita busur dan anak panah milik Bombuya Boma di pantai dekat kantor penerbangan MAF Nabire. Busur dan anak panah itu juga langsung dipatah-patahkan. Pada hari yang sama, diumumkan di RRI Nabire bahwa masyarakat tidak diperbolehkan membawa senjata tajam seperti panah, parang, dll.

Senin, 21 Februari 2000

Masyarakat mulai bereaksi dengan mengadakan demo ke kantor DPRD Nabire menanyakan "*Siapa yang mendatangkan Brimob? Apa tujuannya? Kapan pulang?*" Janji dari pihak DPRD: bahwa masyarakat dalam dua hari akan mendapat jawaban sehingga diminta pulang.

Rabu, 23 Februari 2000

Masyarakat kembali mendatangi DPRD Nabire untuk menanyakan janji pihak DPRD. Akan tetapi tidak ada anggota dewan yang menerima masyarakat sehingga masyarakat pulang dengan kecewa.

Senin, 28 Februari 2000

Pagi hari Satgas dikejar-kejar di landasan pacu bandara karena dianggap melecehkan

⁴ Masyarakat laki-laki di pedalaman Paniai (Suku Mee) biasa membawa busur dan anak panah ke mana saja mereka pergi sebagai bagian dari identitas keberadaan mereka. Kebiasaan ini merupakan kebudayaan khas orang Mee yang dibawa terus oleh setiap laki-laki Suku Mee termasuk saat mereka berada di Nabire.

Brimob. Siangnya, masyarakat Papua bergerak ke rumah pribadi Bupati di Jl. Pepera, tetapi ditahan oleh Brimob. Pk. 17.00, masyarakat pulang ke Karang Tumaritis dengan melewati jalan Pepera. Pada saat itu, Brimob menyita busur dan anak panah milik beberapa orang masyarakat, lalu mematahkannya. Para pemiliknya melaporkan tindakan Brimob tersebut kepada Satgas Papua ke Taman Gizi. Setelah melaporkan kejadian itu, mereka pulang melalui jalan yang sama (Jl. Pepera) bersama rombongan massa. Akan tetapi di ujung jalan mereka sudah dihadang oleh Brimob. Terjadilah pertengkaran mulut. Manase Erari (Wakil Ketua Sema STIA Nabire) berusaha menengahi pertengkaran itu dengan menjelaskan bahwa busur dan anak panah adalah alat budaya dan bukan senjata pembunuh. Akan tetapi, menurut pendapat pihak kepolisian, karena Manase bergerak mendekati salah seorang Brimob yang mengarahkan senjatanya kepada masyarakat maka oleh Brimob lainnya, ia dikira akan merebut senjata tersebut sehingga segera menembak Manase tepat di dahi dan langsung meninggal dunia di tempat. Peristiwa penembakan terjadi di sekitar Telkom Nabire.

Steven Yobe yang melihat Manase Erari ditembak berusaha untuk mengangkat jenazahnya tetapi ada anggota Brimob lainnya yang menghunus bayonet untuk menikamnya. Terjadilah perkelahian untuk merebut bayonet yang mengakibatkan Steven terluka tangannya.

Selasa, 29 Februari 2000

Dini hari sekitar pukul 01.30 terdengar tembakan sporadis yang dikeluarkan oleh Brimob dari atas truk saat melintas di Jl. Jakarta dimana terdapat Posko Satgas Papua. Posko itulah yang biasa menjadi tempat kumpul Willem dkk. Akibatnya, pagi hari, masyarakat Papua menutup jalan-jalan kota dengan cara memotong pohon-pohon dan menaruhnya melintang di jalan. Situasi kota tegang mencekam dan lumpuh total. Sekolah, kantor, bandara, pasar, toko—semua tutup. RRI tidak ada siaran karena para pegawai tidak bisa masuk kantor. Tembakan secara sporadis terdengar di sekitar Jl. Pepera. Brimob ditarik ke Polres. Terjadi penangkapan dan penahanan oleh pihak kepolisian. Yance Pekei⁵ adalah salah seorang yang ditangkap di depan GOR (gedung olahraga), Kotalama (jauh dari lokasi kerusakan), saat hendak pulang ke rumahnya di Kalibobo. Dia mengalami penyiksaan dalam tahanan Polres Nabire. Massa berkumpul di dua titik: Karang Tumaritis dan sekitar Polres. Hujan deras hingga malam sehingga konsentrasi massa bubar.

Sementara itu di Jayapura, Kapolda Brigjend. Pol. Drs. S.Y. Wenas menyatakan bahwa korban (Manase Erari) meninggal karena peluru senapan angin milik salah seorang anggota masyarakat dan bukan akibat peluru dari pihak aparat keamanan⁶.

⁵ Lihat lampiran daftar korban.

⁶ Lihat pernyataannya yang dikutip oleh harian *Cenderawasih Pos* 1 Maret 2000, hlm. 1 dan *Irya Post* tgl. 1 Maret

Rabu, 1 Maret 2000 pagi hari

Massa mulai bergerak dari arah Karang Tumaritis ke kota. Terjadi tembakan di Bukit Meriam. Bentrokan hebat di depan Gereja Katolik Nabire antara Brimob dengan massa yang bersenjata anak panah, ketapel, dan parang batu. Akibatnya, Maximus Bunay meninggal dunia akibat tembakan yang mematikan oleh Brimob. Sejumlah orang lain luka-luka (*lihat lampiran daftar korban*)⁷. 2 rumah milik Haji Tanrang dan 1 rumah milik Ledeng (yang berseberangan dengan rumah Haji Tanrang) di Jln. Jend. Sudirman dibakar massa karena dicurigai sebagai tempat perlindungan Brimob sebab tembakan berasal dari rumah itu. 1 mobil kijang dan 1 truck yang berada di halaman rumahnya turut dibakar massa. Sekelompok masyarakat lari mengungsi ke Gereja Katolik dan Susteran AK. Aparat keamanan (Brimob dengan rompi bertuliskan POLISI) mengejar ke lokasi Gereja tetapi diusir oleh Pastor Wolfgang.

Pk. 09.30 terjadi tembakan lagi di Jl. Merdeka. Brimob berjaga-jaga di sekitar bandara. Siangnya, seorang warga keturunan Bugis dibacok dan isterinya dianiaya oleh 6 orang Papua di dekat SPK Nabire. Keduanya bisa diselamatkan oleh siswa-siswi SPK. Motornya dilarikan. Situasi kota tetap mencekam.

Sementara itu di Kodim, kira-kira pk. 13.00 serombongan mama-mama melaksanakan demo damai dengan menemui Dandim Paniai Letkol. Inf. Adi Widjaja. Rombongan menuntut kepada Dandim supaya Brimob ditarik keluar dari Nabire dan supaya para tahanan di Polres dibebaskan. Dandim menjawab tuntutan itu dengan mengatakan bahwa situasi keamanan akan ditangani langsung oleh Batalyon (Yonif 753 Paniai) dan Kodim dan dia siap mempertaruhkan jabatan demi masyarakat. Dalam kesempatan yang sama Dandim bersumpah 'demi Yesus' bahwa tidak akan ada lagi tembakan sehingga minta kepada mama-mama supaya pele-pele dibuka supaya dia bisa mengontrol keamanan; dan masyarakat jangan membawa anak panah. Setelah mendengar janji itu, rombongan pulang.

Sore hari, ada pertemuan antara polisi, brimob, dan tokoh-tokoh masyarakat. Isi dari pertemuan itu: tidak ada tembakan lagi tetapi segala pele-pele jalan akan dibersihkan keesokan harinya.

Di Jayapura, Mapolda Irja didemo oleh rombongan masyarakat Papua dipimpin oleh Sabinus Kobogau. Dalam pembicaraan antara rombongan dengan pihak kepolisian, kembali Kapolda Irja, Brigjend. Pol. Drs. S.Y. Wenas, menegaskan bahwa korban

2000 hlm. 1. Pernyataan yang sama juga dikeluarkan oleh Kapolres Paniai, Letkol. Pol. Drs. Faizal.

⁷ Daftar korban selengkapnya kami susun berdasarkan sejumlah sumber a.l. pihak RSUD Nabire tertanggal 13 Maret 2000 yang ditandatangani oleh Dr. E. A. Osok selaku direktur RSUD Nabire.

meninggal dunia akibat peluru senapan angin⁸.

Kamis, 2 Maret 2000 pagi hari

Pada pagi hari, Pdt. Auwe dan Ruben Edoway (Wakil Ketua Dewan Paroki/ Gereja Katolik Nabire) menghadap Dandim untuk meminta jaminan keamanan saat penguburan Maximus Bunai di lokasi pengibaran bendera. Dandim menyatakan kesediaannya. Gabungan TNI Brimob dan beberapa anggota masyarakat membersihkan pele-pele pohon di jalan. Situasi kota agak tegang tetapi sejumlah masyarakat sudah berani keluar rumah. Dandim 1705 Paniai Letkol. Inf. Adi Widjaya hadir dalam kegiatan di Taman Gizi itu dan malah bersumpah 'demi Yesus' bahwa tidak akan terjadi lagi tembakan⁹.

Pk. 13.40 terjadi tembakan di taman gizi. Saat itu Willem Manimwarba berada di situ dan tiba-tiba konvoi mobil muncul lalu serombongan Brimob datang dengan mobil gudang Farmasi Kabupaten Paniai¹⁰ menembak dia. Willem lari menghindari tembakan yang datang bertubi-tubi tetapi terus dikejar oleh serombongan Brimob. Akhirnya dia dilumpuhkan dengan luka tembak di tangan dan paha lalu dilarikan ke RSUD Nabire. Pada saat itu sedang dilaksanakan penguburan jenazah Maxi Bunay oleh Ruben Edoway dan Pdt. Auwe. Begitu melihat aparat keamanan menghamburkan peluru, massa perkabungan bubar. Massa Papua mengamuk lagi dan kembali membuat pele-pele dan melempari rumah-rumah di sekitar Taman Gizi. Kota kembali tegang. Setiap poros jalan dijaga oleh massa Papua.

Jumat, 3 Maret 2000

Dini hari Willem Manimwarba meninggal dunia di rumah sakit akibat pendarahan. Sekitar 60-orang warga mengadakan pertemuan di Mapolres Nabire. Hadir dalam pertemuan itu: Muspida, Brimob, Dandim, Polres. Tetapi pertemuan tidak melibatkan petugas Gereja dan kalangan cendekiawan Papua. Yang dilibatkan adalah ketua RT/RW. Ada kesepakatan:

- Semua pele (palang) jalan dibersihkan kembali oleh masyarakat.
- Semua senjata tajam (anak panah, parang, busur) dikumpulkan dan diserahkan ke Polres.
- Masyarakat diharap menjaga keamanan lingkungannya masing-masing.

Dalam pertemuan itu dituntut supaya Brimob keluar dari Nabire dan dijanjikan akan

⁸ *IRJA POST* tgl. 2 Maret 2000 hlm. 1 dan *Cenderawasih Pos* tgl. 2 Maret 2000. Lihat juga pernyataan senada yang dikeluarkan oleh Danpomdam XVII/Trikora Kol. CPM. Soegijanto SH dalam *Cenderawasih Pos* tgl. 3 Maret 2000.

⁹ Perkataan sumpah Dandim 1705 Paniai, Letkol. Inf. Adi Widjaya, ini cukup melekat dalam ingatan masyarakat karena terasa agak janggal di telinga masyarakat umum bahwa Dandim yang adalah seorang muslim mengucapkan sumpah 'demi Yesus' (=bahasa Kristen) dan malah diucapkan dalam dua kesempatan yang berbeda.

¹⁰ Menurut pengakuan Dr. Osok, Direktur RSUD Nabire, pemakaian mobil kesehatan ini adalah tanpa izin dan sudah diprotes oleh pihaknya kepada pihak Polres Paniai via telpon. Penerima telpon yakni Kasatserse, Pandjaitan, mengaku akan segera menariknya.

ditarik oleh pihak aparat keamanan. Masyarakat juga menuntut supaya para tahanan dibebaskan. Tetapi ditegaskan oleh aparat keamanan bahwa siapa yang membawa senjata tajam akan ditindak tegas.

Sabtu, 4 Maret 2000

Situasi kota mulai normal dilihat dari segi aktivitas masyarakat mulai muncul: pasar dan toko-toko kecil. Tetapi sekolah, toko-toko besar, dan kantor tetap tutup. Willem dimakamkan di lokasi tiang Bendera Papua di Taman Gizi dengan satu upacara pemakaman yang dihadiri oleh massa Papua. Willem dimakamkan sebagai "pahlawan nasional Papua" dengan peti yang ditutup dengan bendera Papua.

B.2. Kesaksian Yance Pekei, 21 th, petani.

Yance Pekei adalah korban yang ditangkap oleh Brimob di depan GOR, Kotalama, saat hendak kembali ke rumahnya di Kalibobo, bersama satu orang temannya: Silas Dogopia. Tanggal 29 Februari 2000 pagi-pagi, dia dihadang oleh regu Brimob dan disuruh membuang busur dan anak panah yang dibawanya. Dia mengikuti perintah itu, tetapi dia masih disuruh merangkak di jalan aspal. Setelah itu, ia diborgol dan dinaikkan ke mobil kijang patroli polisi dan dibawa ke Mapolres. Dia ditahan dan diinterogasi dengan penyiksaan oleh empat orang polisi. Menurut pengakuannya, dia ditanya 'Datang darimana?' dan dijawab 'dari bendera'. Pertanyaan berikut, 'Jaga bendera dapat gaji berapa?' dijawab 'tidak ada' lalu disambung 'Rp. 2,5 juta to?' Yance jawab 'Perjuangan Papua itu panjang dan tidak ada yang bayar'. Polisi membentak dengan katakana 'Ko tipu' dan menancapkan heker di telinga kanan Yance¹¹. Lalu dilanjutkan 'Sayori kasih makan ko, toh?' dijawab, 'masyarakat yang kasih makan'. Dalam interogasi itu ia dipukul dengan popor senjata di kepalanya atau di dada dengan balok kayu jika menjawab 'tidak'. Ia juga ditanya, 'Kamu bangsa apa?' dijawab 'Bangsa Papua' lalu 'Ko bukan bangsa Indonesia?' dijawab 'Bapa saya Papua, mama saya Papua, tanah saya Papua. Saya bangsa Papua'. Yance lalu disuruh tidur telentang di lantai dan diinjak di dada dengan sepatu lars oleh sejumlah brimob. Polisi juga mengikat dengan plastik di jari kanan (jari tengah) dan membakarnya; juga dibakar di bahu kanan. Siksaan masih dilanjutkan dengan strom listrik yang dililitkan di pergelangan tangan kirinya. Kemudian dia disuruh pilih dari salah satu alat penyiksaan di meja yang ada di depannya. Yance pilih pistol. Polisi tanya, "Kenapa?" dijawab 'supaya mati satu kali dan jadi pahlawan'. Pistol dimasukkan ke mulutnya tetapi tidak ditembakkan.

Akibat siksaan itu, akhirnya Yance pingsan dan dibawa ke RSUD Nabire oleh pihak kepolisian tgl. 3 Maret 2000 malam hari. Oleh kepolisian dikatakan bahwa korban

¹¹ Menurut pengakuan korban, TPF DPRD Irija telah mengambil foto keadaan ini saat tim tersebut mengadakan penyelidikan di Nabire.

ditemukan di lokasi pasar Oyehee yang bersebelahan dengan lokasi pengibaran bendera Papua. Setelah dirawat oleh dokter selama 1 malam di RSUD, korban minta pulang karena merasa tidak aman tinggal di rumah sakit.

Selama ditahan di Polres itu, ia mengaku sempat bertemu dengan Aten Dimi yang mengalami penyiksaan penyiksaan lebih berat. Tahanan ini tidak boleh dikunjungi baik oleh LSM maupun TPF DPRD Irija.

B.3. Sejumlah Catatan Kritis:

1. Tembakan mematikan

Dalam insiden Nabire berdarah ini, ada dua korban yang langsung meninggal seketika akibat tembakan mematikan, yakni Menase Erari dan Maximus Bunai. Tindakan ini betul-betul telengas bagi aparat kepolisian yang menyatakan 'hendak menegakkan hukum'. Mengapa aparat keamanan tidak berusaha memberikan tembakan peringatan dan kemudian melumpuhkan korban terlebih dulu seandainya perlu? Berdasarkan alasan hukum manakah, aparat keamanan berhak menembak mati warganegara yang tidak bersenjata dan tidak dalam posisi mengancam?

2. Penggunaan 'peluru'

Kapolda Irija, Kadispen Polda, Kapolres Paniai maupun Danpomdam terus menerus membuat pernyataan bahwa korban yang meninggal adalah akibat peluru dari senapan angin kaliber 4,5 dan ditembakkan dari jarak jauh. Peluru bukan dari senjata Polri atau TNI karena hanya dipergunakan peluru karet. Menurut keterangan dari pihak RSUD Nabire, dalam jenazah korban yang meninggal maupun yang luka-luka ditemukan proyektil logam atau terkena tembakan dari peluru tajam dan atau peluru karet. Dalam tubuh dua korban yang langsung meninggal di tempat, yakni Maximus Bunai dan Menase Erari, ditemukan proyektil logam. Proyektil yang ada di tubuh Maximus Bunai telah diserahkan kepada pihak POM Nabire sedangkan yang ada di tubuh Menase Erari telah diserahkan kepada pihak Polres Paniai. Berdasarkan keterangan RSUD itu, bagaimanakah pernyataan para pejabat Polri dan TNI tersebut bisa dipertanggungjawabkan? Apakah mungkin seseorang dengan senapan angin menembak korban dari jauh dan meninggal seketika padahal di dalam tubuh korban ditemukan proyektil logam? Mengapa para pejabat Polri dan TNI malah hendak menutupi fakta dan tidak berusaha mengungkapkan kebenaran?

3. Keterlibatan TNI

Dalam insiden Nabire itu, Dandim 1705 Paniai, Letkol. Inf. Adi Widjaja akhirnya mengambil bagian aktif dalam operasi keamanan dan berbagai perundingan. Pihak TNI malah menjanjikan bahwa keamanan dijamin oleh Kodim dan Batalyon Yonif 753

dan mengatakan 'tidak akan ada penembakan'. Mengapa pihak TNI melibatkan diri dalam persoalan keamanan yang menjadi tanggung jawab polisi bahkan dengan bersumpah di hadapan umum?

4. Politisasi Agama

Masyarakat mencatat bahwa sebanyak dua kali (1 dan 2 Maret 2000) dalam dua kesempatan yang berbeda, Dandim 1705 Letkol. Inf. Adi Widjaja mengucapkan sumpah 'demi Yesus' bahwa tidak akan ada lagi penembakan. Menjadi pertanyaan serius mengapa Dandim menggunakan bahasa religius?, dipakai begitu saja untuk urusan keamanan? Apakah Dandim hanya memakai sumpah itu sebagai taktik meredam emosi massa? Bukankah sumpah dengan bahasa religius yang terbukti tidak terpenuhi (tidak akan ada penembakan) hanya melecehkan simbol-simbol religius?

5. Janji penarikan Brimob

Dalam rapat tgl. 3 Maret 2000 di Mapolres Nabire, pihak aparat keamanan berjanji akan menarik Satuan Brimob dari Nabire asalkan masyarakat bersedia membersihkan pele-pele jalan. Syarat ini telah dipenuhi oleh masyarakat dengan pembersihan palang-palang jalan. Akan tetapi, mengapa janji penarikan Brimob tidak dipenuhi oleh pihak aparat keamanan bahkan Kapolda Brigjend. S.Y. Wenas di Jayapura tgl. 5 Maret 2000 menegaskan bahwa Brimob tidak mungkin ditarik malah akan ditambah?¹² Apakah ini merupakan taktik pihak aparat keamanan untuk mengecoh masyarakat dengan pernyataan yang saling bertentangan antar para pejabat kepolisian? Berapa lama lagi ketidakjujuran ini hendak dipertahankan oleh aparat keamanan? Berapa lama lagi masyarakat tetap menjadi korban dari janji-janji kosong dan permainan kata sedemikian?

6. Penahanan dengan penyiksaan terhadap Yance Pekei

Dilihat dari lokasi penangkapan, Yance Pekei berada jauh dari lokasi peristiwa entah peristiwa penembakan entah peristiwa pengibaran bendera. Berdasarkan alasan apakah polisi begitu saja menangkapnya? Lebih lanjut, atas dasar apakah polisi menyiksa Yance Pekei selama berada dalam tahanan? Selain Yance Pekei, apakah masih ada korban penahanan dengan penyiksaan lainnya yang tidak diakui oleh polisi seperti disinggung oleh Yance dalam pengakuannya?

7. Pemakaian mobil Farmasi Kabupaten Paniai

Menurut keterangan dari pihak RSUD Nabire, mobil gudang farmasi Kabupaten Paniai dipakai oleh polisi untuk melakukan patroli dan operasi; padahal mobil tersebut (dan sarana kesehatan/ rumah sakit lainnya) termasuk wilayah netral. Ini berarti telah

¹² Pernyataan Kapolda ini terdapat dalam *Cenderawasih Pos*, tanggal 6 Maret 2000.

terjadi penyalahgunaan simbol-simbol kemanusiaan untuk kepentingan aparat keamanan. Direktur RSUD Nabire telah menyatakan protesnya via telpon kepada pihak Polres Paniai pada tgl. 2 Maret 2000 tetapi tidak ditanggapi secara konkret. Dengan penyalahgunaan mobil tersebut, tugas kemanusiaan yang dijalankan pihak RSUD Nabire terhalangi dan malah terancam karena massa mengira bahwa mobil ambulans-lah yang dipakai untuk mengadakan operasi keamanan. Karena itu menjadi pertanyaan serius mengapa pihak Polri tetap berkeras memperlak salah satu sarana kemanusiaan itu? Berdasarkan dasar hukum manakah tindakan ini diambil dan dipertahankan?

C. Pasca Insiden

C.1.

Insiden Nabire berdarah cukup mengubah dinamika kehidupan masyarakat Nabire. Perhatian sekarang dipusatkan pada bendera Papua yang tetap berkibar di lokasi Taman Gizi dan tetap dijaga oleh pihak masyarakat Papua. Pemerintah Daerah, Polres Paniai, Dandim Paniai, menekan pihak LMA Nabire untuk segera menurunkan Bendera Papua karena dianggap sebagai penyebab kerusuhan Nabire. Tekanan itu rupanya membawa hasil dengan kesepakatan antara LMA Nabire dengan pemerintah Muspika Nabire yang dirumuskan dalam kesepakatan bersama tanggal 11 Maret 2000. Dalam kesepakatan itu digariskan 7 butir kesepakatan a.l. [1] bendera harus diturunkan, [2] akan diadakan upacara penurunan bendera tgl. 12 Maret 2000, [3] akan diadakan rekonsiliasi antara pemerintah dengan masyarakat¹³. Akan tetapi, kesepakatan tersebut belum juga terlaksana.

C.2.

Tgl. 23 Maret 2000, ketua LMA Nabire, Manase Sayori, bersama beberapa pendeta dan anggota LMA lainnya sudah menyiapkan upacara penurunan bendera Papua. Akan tetapi, saat berdiri di depan pagar lokasi pengibaran bendera, mereka diancam oleh masyarakat Papua di luar pagar untuk tidak menurunkan bendera. Dengan peristiwa itu, Manase Sayori (Ketua LMA Nabire) menyatakan mundur tidak hanya dari usaha penurunan bendera tetapi dari seluruh tanggung jawab pengibaran Bendera Papua.

C.3.

Sejalan dengan pengunduran diri LMA, peran Satgas Papua makin banyak disoroti khususnya menyangkut kekurangjelasannya: dasar keanggotaan, lingkup penugasan, kepengurusan intern, dan kepemimpinannya. Berdasarkan sumber-sumber informasi yang tersedia dapat disimpulkan bahwa secara intern kelompok Satgas Papua Nabire terdiri dari tiga unsur: (1) unsur murni, yakni kelompok Satgas yang dari awal memang berniat untuk menjaga ketertiban dalam kegiatan-kegiatan masyarakat Papua yang mengekspresikan aspirasinya, (2) unsur 'ikut-ikutan' yang mudah dibelokkan ke kiri atau ke kanan, (3) unsur yang sebenarnya diatur oleh pihak luar yang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Kekaburan ini memberikan peluang besar bahwa sejumlah orang yang menamakan diri "Satgas Papua" mulai terlibat dalam sejumlah tindakan yang kurang dapat dibenarkan, atau malah bersifat kriminal murni. Sebaliknya, pihak kepolisian dan

¹³ Kesepakatan Bersama tertanggal 11 Maret 2000 yang ditandatangani oleh tokoh-tokoh masyarakat, Muspida Kabupaten Nabire, Pimpinan DPRD Nabire, dan Ketua Tim Pencari Fakta DPRD Irja.

militer semakin membebankan segala kriminalitas itu kepada Satgas Papua (stigmatisasi). Dengan demikian, hal ini justru memberikan dasar yang kuat bagi aparat keamanan untuk bertindak seturut rencananya kadang telengas malah sampai membabi buta. Pelan tapi pasti, fenomena kehadiran Satgas Papua juga telah diperalat untuk menghadirkan "Satgas tandingan" yang dibiayai dan didukung oleh pihak yang berkuasa, seperti telah muncul di Fak-fak. Karena itu unsur murni dari kelompok Satgas Papua Nabire mulai menamakan dirinya sebagai LASKAR PAPUA.

C.4.

Hingga kini sejumlah orang masih berada dalam tahanan Polres Paniai. Penangkapan tersembunyi dan tanpa dasar hukum yang jelas tetap berjalan. Kenapa warga masyarakat itu ditahan—kurang jelas. Berita-berita mengenai penyiksaan dalam tahanan ternyata masih menjadi kebiasaan di kalangan aparat keamanan sehingga menjadikan banyak warga masyarakat merasa gelisah, was-was, dan takut, sehingga penegakan hukum tidak terjamin sama sekali. Ketakutan warga ini kiranya cukup beralasan karena usaha kunjungan ke tahanan entah oleh pihak LSM atau oleh pihak agamawan dipersulit oleh pihak kepolisian Paniai. *Karenanya jumlah dan kondisi para tahanan tidak bisa dipastikan mengingat jalan ke arah informasi tersebut tidak dibuka oleh pihak kepolisian..*

C.5.

Walaupun tidak diuraikan secara panjang lebar dalam laporan ini, suasana "menjelang 1 Mei" (harapan dan keyakinan sekelompok masyarakat bahwa Papua sudah merdeka pada tanggal itu) yang sedang merebak di wilayah Pedalaman Paniai turut mempersulit lagi keadaan yang sudah serba sulit dan tidak menentu ini. Nabire—sebagai gerbang menuju ke daerah Pedalaman Paniai—mengalirkan seluruh dinamika sosial politik Nabire ke wilayah pedalaman. Akibatnya, masyarakat di pedalaman terkena imbas kompleksitas permasalahan Nabire tanpa mampu memverifikasinya secara wajar.

C.6.

Dengan demikian, perkembangan masalah berada di jalur yang tidak bisa diramalkan mengingat :

1. kasus penembakan belum juga ditangani secara memadai sehingga rasa amarah tetap membara dalam hati dan ingatan masyarakat Papua;
2. kasus penangkapan semena-mena serta tindak penganiayaan belum juga ditangani secara memadai, dan sejumlah warga masih dalam tahanan kepolisian tanpa bisa dikunjungi secara wajar oleh LSM atau agamawan;
3. perhatian terhadap kasus penembakan dibelokkan kepada kasus pengibaran bendera sehingga kompleksitas masalah Nabire tidak tersentuh;
4. penanggung jawab resmi kegiatan pengibaran bendera sudah melepaskan tanggung

jawabnya sehingga seluruh tanggung jawab dibebankan kepada pihak penjaga bendera;

5. para penjaga bendera (termasuk Satgas Papua) tidak memiliki pemimpin yang jelas lagi sekaligus tidak memiliki rencana lanjutan yang jelas sehingga perundingan dengan pihak manapun selalu gagal;
6. Muspida Kabupaten Nabire telah menerima kesepakatan dari pihak LMA dan terus menuntut;
7. kehadiran Brimob dan keterlibatan TNI dengan jelas mengisyaratkan kemungkinan penurunan paksa seperti telah terjadi di halaman Gereja Tiga Raja, Timika, 2 Desember 1999.

Kesimpulan dan Seruan

Dari data yang diperoleh selama ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan situasi di Nabire selama bulan-bulan terakhir ini sangat memprihatinkan. Nabire telah menjadi ajang pelbagai jenis pelanggaran baik kriminal murni maupun pelanggaran HAM. Kedua jenis pelanggaran itu saling kait mengkait malah dijadikan dasar legitimasi secara timbal balik.

Dengan situasi yang berkembang makin rumit ini, setiap kemungkinan bisa terjadi bahkan ke arah yang lebih buruk. Untuk menghindari hal itu, kami ajukan beberapa seruan/ rekomendasi:

1. pihak aparat keamanan dan pemerintah wajib memberikan penjelasan fakta secara transparan dan profesional;
2. supaya diadakan investigasi yang objektif oleh instansi yang memiliki kewenangan hukum (*pro iustitia*) mengenai terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM di Nabire selama ini, baik menyangkut penembakan yang terarah dan mematikan maupun menyangkut tindakan-tindakan penganiayaan dan penahanan tanpa dasar hukum yang jelas;
3. pihak aparat keamanan dan pemerintah wajib mengusut pihak-pihak yang terlibat dalam insiden penembakan maupun penyiksaan secara hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
4. supaya status para tahanan politik segera dijelaskan oleh pihak kepolisian dan tahanan politik yang ditangkap tanpa dasar hukum segera dibebaskan;
5. supaya aparat keamanan segera kembali kepada fungsinya sebagai pelindung masyarakat dan bertindak sewajarnya dalam hal-hal kriminal guna menjaga keamanan masyarakat berdasarkan sistem hukum yang berlaku dan dengan dukungan sewajarnya dari segala pihak;
6. supaya Satgas Papua mengatur diri kembali dan membatasi diri pada fungsinya

semula, yakni menjaga ketertiban dalam kegiatan-kegiatan masyarakat Papua yang mengungkapkan aspirasinya secara teratur dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku;

7. supaya pemerintah menangani korban-korban insiden baik melalui perawatan medis maupun santunan lainnya yang wajar;
8. supaya pemerintah dan masyarakat segera membuka kembali ruang untuk berdialog secara wajar dan sejauh perlu bisa memakai perantaraan pihak ketiga yang dipercayai oleh kedua belah pihak
9. supaya pemerintah dan masyarakat sebaik-baiknya bersedia menerima fakta bahwa persoalan Nabire adalah kompleks dan berakar pada kepentingan kedua belah pihak.

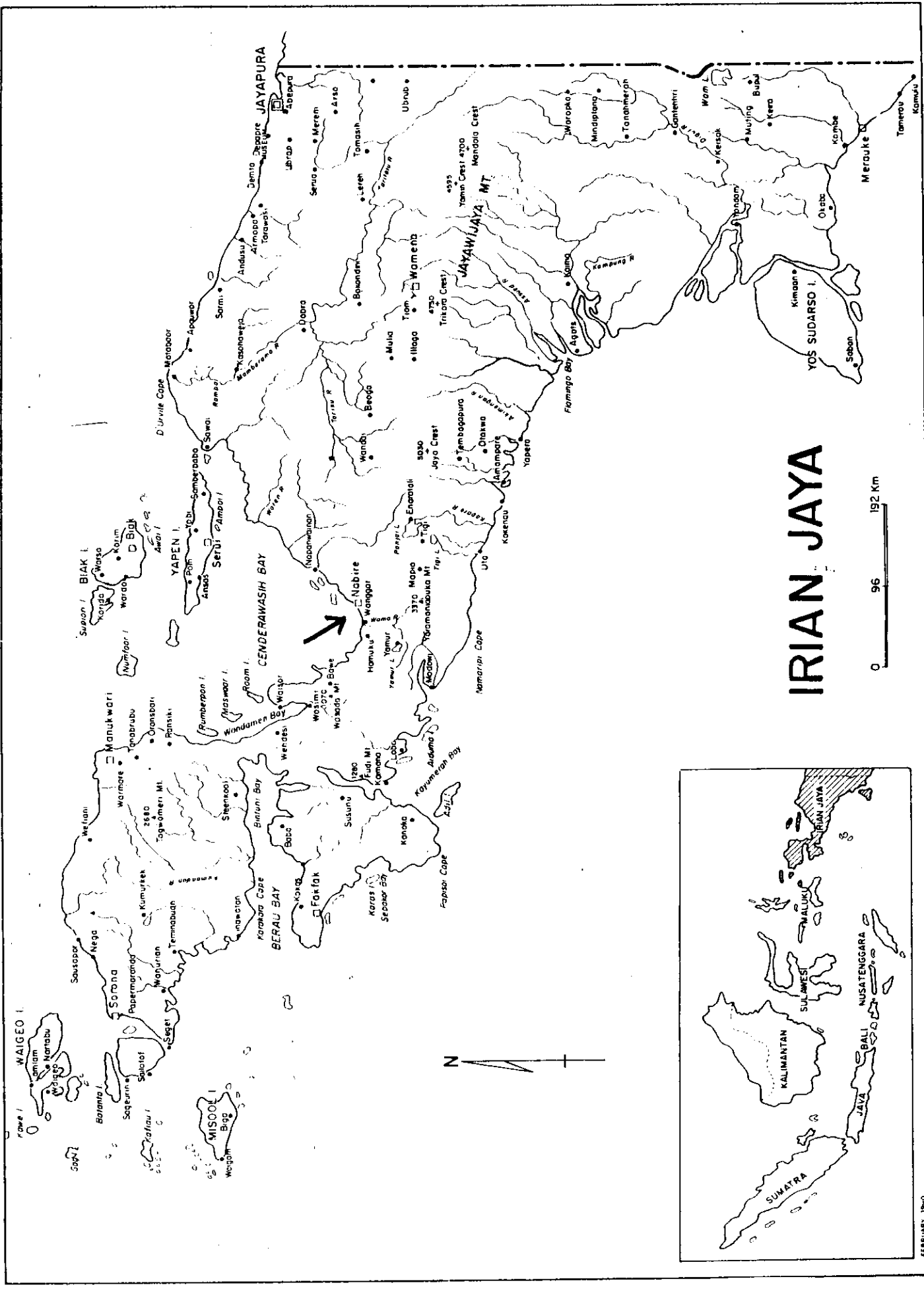
Lampiran 1

DATA KORBAN INSIDEN NABIRE¹⁴

No.	Nama Korban	Umur	Pekerjaan	Alamat	Keterangan
Tanggal 28-29 Februari 2000					
1.	Menase Erari	33	PNS	Jl. Kusuma Bangsa, Nabire	Meninggal akibat tembakan
2.	Maximus Bunai	27	Petani	Karang Tumaritis	Meninggal akibat tembakan
3.	Stephen Yobe	20	Mahasiswa	Asrama Kangguru	Luka robek di pergelangan tangan
4.	Ben Gobay	35	Petani	Karang Tumaritis	Luka di bagian kepala
5.	Melkias Pakage	20	Petani	Asrama Kangguru	Luka tembak di paha
6.	Vincen Degey	24	Petani	Epomani, Mapia	Luka tembak di kaki kanan
7.	Suwarno	-	-	Nabire	Luka robek di kepala
8.	Ismail M.	23	Brimob		Luka robek di bagian perut
9.	Shabir	32	Swasta	Nabire	Luka robek di pelipis, punggung, mata
10.	Alex Tebay	20	Pelajar SMU	-	Luka di punggung dan kaki
Tanggal 1 Maret 2000					
11.	Thomas Misiro	32	-	-	Luka tembak di perut
12.	Yan Degey	25	Petani	-	Luka tembak pada kaki kanan
13.	Paulus Mote	30	Petani	Karang Tumaritis	Luka tembak pada kedua paha
14.	Hendrik Wakey	17	Pelajar	-	Luka tembak pada pantat kiri/kanan
15.	Darius Zany	16	Pelajar	-	Luka tembak di dada

¹⁴ Data korban ini kebanyakan diambil dari data yang dikumpulkan oleh RSUD Nabire tertanggal 13 Maret 2000 yang ditandatangani oleh Dr. E. A. Osok selaku direktur RSUD Nabire.

Tanggal 2 Maret 2000					
16.	Saptoreno	42	-	Nabire	Luka memar di bibir, mata kiri/kanan
17.	Benny Bagau	28	-	-	Luka memar di telinga kiri
18.	Wellem Maniwarba	25	Petani	Bumi Wonorejo	Meninggal akibat luka tembak
Tanggal 3 Maret 2000					
19.	Pindeki Wonda	20	-	Nabire	Luka pada kaki dan punggung
20.	Yance Pekey	21	Petani	Kalibobo	Luka pada punggung, jari tangan, telinga, akibat penganiayaan
21.	Safaruddin	26	-	Nabire	Luka pada bahu



IRIAN JAYA

0 96 192 Km